

STUDI PRAKTIK REKAYASA AKUNTANSI YANG TERUNGKAP MELALUI MEDIA MASSA PADA PERIODE 2000-2002

Intiyas Utami

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi- Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Corporate accounting scandals have rocked the market recently, it's getting hard to keep track of all transgressions. Enron Corp, whose billion dollars in debt hidden in related partnerships, was a major cause of the company downfall. Arthur Andersen LLP, the Enron Enron's auditor, were issued reminders about the firm's document-retention and destruction document related to Enron with full knowledge of an SEC investigation. Another big company in USA, WorldCom, said that it falsely inflated its 2001 and first-quarter 2002 financial results by concealing \$ 3.8 billion in expenses increased the concerns of corporate customers already worries about the company viability. The accounting problem like in USA also happened in Indonesia, for example Kimia Farma, that have marked up the income.

This paper aims to know the bad accounting practices that caused the accounting scandals and the role of good corporate governance and accountant to minimize bad accounting practices. Research method conducted by using approach.

Keywords: a accounting scandal, godd corporate government, fiancial engineering management froud.

Pendahuluan

Kebutuhan akan penerapan *good corporate governance* (GCG) semakin kuat karena dengan konsep ini pengelolaan perusahaan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dengan selaras. Demikian juga untuk dapat mempercayai suatu informasi keuangan yang dihasilkan manajemen, dibutuhkan jasa akuntan publik yang memberi penilaian secara independen mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Namun, dalam dua tahun terakhir (2000-2002), media massa gencar memberitakan adanya praktik rekayasa akuntansi yang menyebabkan tumbangya beberapa perusahaan raksasa di Amerika Serikat.

Terbongkarnya berbagai rekayasa akuntansi di negara yang mendukung-dukung prinsip *good corporate governance*, telah menghancurkan kepercayaan investor terhadap bursa saham (Kontan, 8 Juli 2002). Kasus yang mula-mula meledak di Amerika Serikat adalah Enron, perusahaan yang memiliki kontrak bisnis dengan pemerintahan Amerika Serikat melakukan praktik rekayasa akuntansi dengan cara sengaja tidak mencatat kewajiban dalam laporan keuangannya pada periode tahun 2000. Kasus Enron ini juga

terjadi pada perusahaan besar di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya adalah *WorldCom, Xerox, Mercks, Tyco International, Adelphia Communication* (Bisnis Indonesia, 8 September 2002). Terungkapnya skandal ini menyebabkan harga saham di Amerika Serikat jatuh dengan tajam, seperti dimuat dalam *Wall Street Journal Europe*, January 30, 2002:

U.S stocks fell sharply as investors got more unsettling corporate news just us a two day Federal reserve policy meeting opened. The Dow Jones Industrial average 2,51 percent, setting it up for its biggest one-day drop since october.29

Permulaan suatu penyimpangan atau rekayasa akuntansi biasanya dimulai dari persoalan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi antara penyaji laporan keuangan dengan pemakai informasi laporan keuangan. Peran laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang wajib dipublikasikan ke publik. Informasi tersebut diperlukan oleh *stakeholder* untuk menilai kinerja suatu entitas usaha. Kualitas laporan keuangan yang tersaji kepada publik akan menjadi ukuran apakah informasi tersebut menyajikan fakta yang sesungguhnya atau mengandung rekayasa demi kepentingan tertentu.

Rekayasa akuntansi yang terjadi di perusahaan-perusahaan publik di *Wall Street* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Contohnya adalah PT. Kimia Farma yang terbukti melakukan *markup* atas labanya dengan cara yang tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Rekayasa akuntansi ini begitu menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Oleh karena itu tulisan ini akan menelusuri beberapa hal penting yaitu: (a) berbagai bentuk rekayasa akuntansi yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai contoh kasus, (b) peran *good corporate governance* dan akuntan untuk meminimalkan rekayasa akuntansi yang mengarah pada dampak negatif atau merugikan kepentingan *stakeholder*.

Tinjauan Teoritis

Perusahaan yang akan *go public* ingin menunjukkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya, sehingga membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik rekayasa yang dapat memoles laporan keuangan tersebut. Penyebab rekayasa akuntansi bila ditelusuri lebih lanjut dengan konsep *agency theory* dapat dijelaskan bahwa manajemen sebagai *agent* semestinya *on behalf the best interest of the shareholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Seperti yang diungkapkan Ross dkk (1996) bahwa

.....the claim that managers can ignore the interest of shareholders is deduced from the fact that ownership in large corporation is widely

dispersed. As a consequence, it is often claimed that individual shareholders cannot control management.

Menurut teori ini hubungan antara pihak-pihak tersebut pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Konflik di antara manajemen dan pemegang saham, misalnya terjadi karena pemegang saham di satu pihak berkehendak agar manajemen bertindak sesuai dengan kepentingannya tanpa diamati langsung oleh *principle* (pemilik), (Purwanto 2001). Untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan, bahkan bisa dalam jangka panjang merugikan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini rekayasa akuntansi yang dilakukan bersifat negatif.

Menurut Laksono (2002), rekayasa akuntansi dapat melalui banyak teknik. Namun, secara garis besar ada dua macam rekayasa akuntansi, yaitu: (1) rekayasa keuangan (*financial engineering*) yakni suatu usaha merekayasa bagian tertentu dari laporan atau transaksi keuangan tertentu melalui prinsip akuntansi yang berlaku umum yang bersifat arbitrer serta memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang atau peraturan lain untuk mempercantik laporan keuangan atau tujuan keuangan lain, misalnya restrukturisasi usaha dan sebagainya, (2) rekayasa akuntansi dapat mengarah pada penipuan oleh manajemen (*management fraud*).

Berbagai teknik rekayasa akuntansi dapat dilakukan dengan mempergunakan celah-celah yang tidak melanggar standar akuntansi, misalnya pemilihan beberapa metode dalam akuntansi. Selain itu, rekayasa akuntansi dapat dilakukan dengan melanggar standar akuntansi, misalnya pembelian fiktif atas aktiva yang bergerak dan penyembunyian transaksi atau informasi yang material, pengelembungan nilai aktiva (*asset mark-up*), penjualan fiktif, *holding cost* atau penanggungan biaya operasional (Laksono 2000; Brown 2001), dan *off the books, valuing assets* (Brown 2001).

Suatu rekayasa akuntansi yang terjadi bisa juga melibatkan auditor (akuntan publik) yang memberikan penilaian yang tidak jujur dan tidak obyektif. Tidak independennya auditor bisa disebabkan auditor memberikan jasa konsultasi laporan keuangan, sekaligus juga memberikan jasa pemeriksaan akuntansi (audit) kepada klien yang sama. Auditor yang telah menjalin kerjasama yang baik dengan klien dalam jangka waktu yang relatif lama sebenarnya mengetahui hal-hal yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, akan tetapi tidak mengungkapkan dalam laporan auditnya. Karena itu opini auditor atas laporan keuangan klien menjadi diragukan keandalannya.

Berbagai praktik rekayasa akuntansi semakin menyadarkan pada pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan-perusahaan. *Good corporate governance* menurut The *United Nations Development Program* (UNDP), seperti yang dikutip Priantara (2002), adalah partisipasi (*participatory*), transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), juga efektif dan efisien. GCG mendorong ketaatan kepada hukum, kesederajatan, dan keadilan berdasarkan hukum. Hasil riset McKinney & Co pada tahun 1996 seperti yang dikutip Priantara (2002) menyatakan beberapa investor Amerika Serikat bersedia membayar suatu nilai lebih kepada perusahaan yang dikelola dengan baik. Pada tahun 2000, riset yang serupa setelah dilakukan penyempurnaan (replikasi) menunjukkan hasil yang sama. Ini berarti bahwa negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber dana internasional dibandingkan mereka yang tidak mempunyai *corporate governance* yang baik.

Pendekatan Studi

Studi yang dilakukan ini adalah *historical research*, seperti yang dikutip dari Gay and Diehl (1992):

The systematic collection and objective evaluation of data related to past occurrences in order to test hypotheses concerning causes, effects, or trends of those events that may help to explain present events and anticipate future events.

Penyelenggaraan penelitian historis ini lebih mendasarkan pada penelusuran dokumen seperti yang dimuat dalam berbagai media massa sebagaimana diungkapkan oleh Aquino (1992) bahwa:

In carrying out historical research, the investigator conducts a systematic search for documents and other sources that contain fact related to the historian's questions about the past. Historical research can give us valuable insight into the origin and reasons for practices presently found in the school.

Dalam tulisan ini hanya akan ditelusuri dokumen mengenai peristiwa rekayasa akuntansi selama dua tahun terakhir (tahun 2000-2002) yang dimuat di berbagai media massa serta *website* dan dipilih lima perusahaan yang terbukti melakukan rekayasa akuntansi yang terdiri dari empat perusahaan besar di Amerika Serikat dan satu perusahaan di Indonesia, seperti yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Nama Perusahaan dan Sumber Data

NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	SUMBER DATA
Enron	Energi	• www.kompas.com
WorldCom	Telekomunikasi	• Wall Street Journal Europe
Xerox	Mesin Fotocopy	• Kompas
Mercks	Farmasi	• Bisnis Indonesia
PT. Kimia Farma	Farmasi	• Bisnis Indonesia • www.kompas.com

Kajian Kasus

Kajian kasus ini memaparkan bentuk rekayasa akuntansi yang terjadi dalam kasus perusahaan yang dipilih sebagai obyek analisis, serta hal-hal yang dapat diberi perhatian dari kasus rekayasa akuntansi yang terjadi yaitu upaya pelaksanaan *good corporate governance* dan *independence auditor* untuk meminimalisasi rekayasa akuntansi yang membawa dampak yang negatif atau merugikan kepentingan *stakeholder*. Berikut ini akan disajikan tabel kasus dari enam perusahaan yang dipilih sebagai obyek penelitian.

Tabel 2 Praktik Rekayasa Akuntansi

PERUSAHAAN & WAKTU PUBLIKASI	PRAKTIK REKAYASA AKUNTANSI	AKIBAT	PIHAH YANG TERLIBAT
Enron Oktober 2001	<ul style="list-style-type: none"> • Secara sengaja tidak mencatat kewajiban dengan cara off balancesheet 	<ul style="list-style-type: none"> • Expense Understated ↓ • Laba Overstated 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen • Auditor (Arthur Andersen)
WorldCom Maret 2002	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya operasi normal 3,9 milyar dollar AS, dimasukkan dalam pos investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Expense understated ↓ • Laba overstates 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen • Auditor (Arthur Andersen)
Xerox Juni 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Mencatat pendapatan tidak sama dengan taksiran SEC 	<ul style="list-style-type: none"> • Overstated revenue ↓ • Overstated laba 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen • Auditor (KPMG LLP)
Mercks July 2002	<ul style="list-style-type: none"> • Membukukan 14 Milyar dollar AS keuntungan yang sebenarnya tidak pernah diperoleh 	<ul style="list-style-type: none"> • Revenue overstated ↓ • Laba overstated 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen • Auditor (Arthur Andersen)
PT.Kimia Farma Oktober 2002	<ul style="list-style-type: none"> • Persediaan dicatat dalam jumlah yang diakumulasi antara persediaan awal pada 2002 dengan persediaan akhir 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persediaan overstated ↓ • Aset overstated, • Laba overstated 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen • Auditor (Hans Tuanakota & Mustofa)

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Motivasi rekayasa akuntansi yang ditemukan dalam semua kasus di tabel 2 adalah untuk menaikkan nilai perusahaan. Usaha untuk menaikkan nilai perusahaan dilakukan dengan mekanisme yang beraneka ragam, namun pada intinya usaha tersebut mengarah pada cara memaksimalkan laba perusahaan

Selain itu, dinyatakan Enron menggunakan instrumen derivatif dan kemitraan *off the book* itu untuk menyembunyikan kinerja buruk kegiatan usaha tertentu dan menyembunyikan utang dari kegiatan usaha yang merugi.

Mekanisme rekayasa akuntansi yang ditemukan Sitorus (2002) dalam kasus Enron adalah adanya perlakuan akuntansi *off the book* dan peran ganda yang dimainkan suatu perusahaan akuntan. Dalam perlakuan akuntansi *off the book*, Enron melakukan pembentukan kemitraan di luar perusahaan dengan investor dan menggunakan nama pribadi eksekutifnya

Adanya peran ganda yang dimainkan akuntan publik Enron yaitu Arthur Andersen, karena menyediakan jasa konsultasi keuangan (jasa non-audit) sekaligus memberikan jasa audit. Biaya audit tahun 2001 sebesar 13,5 kali lipat biaya audit tahun 2000 (27 dollar AS vs dua juta dollar AS). Karena itu, kemungkinan akuntan publik segan untuk mengungkapkan pencatatan akuntansi yang tidak lazim yang disarankan koleganya sendiri apalagi melihat perbandingan besaran keuntungan yang diperoleh perusahaannya. Arthur Andersen juga melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri karena telah menghancurkan dokumen Enron. Seperti yang dimuat dalam *Wall Street Journal Europe* 23 Januari 2002:

David Duncan, the head of the Houston office of Enron's auditor, Arthur Andersen LLP, was dismissed by Andersen last week for having overseen the destruction of documents.

Pendapat senada mengenai keterlibatan Arthur Andersen dikemukakan oleh Orey (2002) yang menyatakan bahwa *Arthur Andersen LLP's destruction of papers related to Enron Corp. has given shredding new notoriety.*

Terungkapnya rekayasa yang dilakukan Enron menyebabkan harga pasarnya jatuh dan kepercayaan pasar terhadap perusahaan dan terhadap Arthur Andersen menjadi tipis.

WorldCom sebagai perusahaan besar di bidang telekomunikasi yang memiliki aset \$ 107 miliar, pada bulan Maret 2002 akhirnya mengakui pihaknya telah merekayasa pembukuan dengan motivasi ingin menaikkan nilai perusahaan. Perusahaan itu mengatakan terus terang sebenarnya belum mencapai keuntungan US\$1.4 miliar seperti yang dipublikasikan pada tahun 2001. Pada tiga bulan pertama tahun 2002, WorldCom mengaku belum mencapai keuntungan sebesar \$3.8 miliar antara Januari 2001 dan Maret 2002. Mekanisme rekayasa yang ditempuhnya dengan cara dana yang seharusnya dimasukkan dalam pos pengeluaran (biaya operasional), dimasukkan sebagai modal (pos investasi). Adanya pos biaya yang *understated* ini menyebabkan pos keuntungan menjadi menjadi lebih besar dan semakin besar keuntungan akan membuat nilai perusahaan semakin tinggi. Akibatnya, perusahaan menjadi kelihatan untung padahal sebenarnya merugi.

Xerox melakukan mekanisme rekayasa akuntansi dengan cara manipulasi pembukuan atas pendapatan atau *revenue* perusahaan dalam jumlah tersebut tidak sama dengan taksiran SEC (*Securities and Exchange Securities*). Terjadinya rekayasa akuntansi di Xerox, melibatkan akuntan publik dan manajemen. Seperti yang dimuat dalam Wall Street Journal (1 Juli 2002):

Xerox confirms it overstated its pretax income 36 percent or total of \$1.41 billion during the past five years. The SEC earlier this year sent notices to a half-dozen people, including former Xerox Chief Financial Officer Bryr D. Romeril, along with two KPMG partners, that it was considering filing civil charges against them in connection with the alleged fraud.

Seperti yang dikutip dari satunet.com bahwa Merck, perusahaan farmasi kedua terbesar di Amerika Serikat, menyatakan telah membukukan 14 milyar dollar AS keuntungan dari anak perusahaan selama tiga tahun terakhir yang sebenarnya tidak diperoleh. Selama tahun 1999 dan 2001 anak perusahaan tersebut telah menyumbangkan 10 persen keuntungan Merck secara keseluruhan. Keterlibatan Arthur Andersen dalam kasus Merck kemungkinan karena KAP ini telah memberikan jasa audit terhadap Merck sejak tahun 1971. Arthur Andersen dapat diragukan independensinya karena dalam waktu yang relatif lama memberikan jasa audit justru tidak mengungkapkan adanya kejangalan praktik rekayasa akuntansi yang dilakukan Merck.

PT. Kimia Farma diduga Bapepam melakukan *mark-up* dengan indikasi bahwa manajemen melakukan upaya menaikkan prestasi serta meningkatkan performa saham ketika akan didivestasi. Mekanisme rekayasa akuntansi dilakukan dengan melakukan pencatatan persediaan dalam jumlah yang diakumulasikan antara persediaan awal 2002 dengan persediaan akhir 2001. Karena itu aset tahun 2001 tampak *overstated*, demikian pula keuntungan 2001 menjadi *overstated*. Laba bersih yang dibukukan tahun 2001 sebesar Rp 132,263 miliar, namun ditemukan laba bersih seharusnya hanya sekitar Rp 100 miliar.

Rekayasa akuntansi yang terjadi di PT. Kimia Farma diduga merupakan keterlibatan auditor PT. Kimia Farma yaitu Hans Tuanakota & Mustofa (HT & M) dengan pihak manajemen. HT & M memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas tahun buku 2001, akan tetapi dalam proses audit semester I/2002 menemukan adanya selisih pendapatan. Hal inilah yang menjadikan auditor dianggap terlibat dalam praktik rekayasa akuntansi Kimia Farma, karena baru tahun 2002 menemukan *mark-up up* kliennya. Pihak Bapepam masih melakukan pemeriksaan terhadap direksi lama Kimia Farma dan Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakota & Mustofa (Bisnis Indonesia, 7 November 2002).

Dari paparan kasus-kasus di atas dapat ditemukan bahwa perusahaan pada umumnya ingin menampilkan nilai perusahaan yang tinggi, supaya menarik minat para investor. Akan tetapi kondisi yang sebenarnya dalam perusahaan belum tentu bagus, sehingga muncul berbagai bentuk mekanisme yang tidak sehat untuk merekayasa laporan keuangannya agar nampak meyakinkan para pemakai laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan yang *overstated* maupun *understated* merupakan kesalahan karena mengelabui pihak lainnya. Bahkan, dalam UU Pasar Modal No.8 tahun 1995 sudah jelas rambu-rambu yang diberikan untuk perusahaan publik. Dalam pasal 91 disebutkan setiap pihak dilarang untuk melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung menciptakan gambaran semu. Pasal 93 mengungkapkan setiap pihak dilarang memberi keterangan tidak benar sehingga mempengaruhi perdagangan efek atau sahamnya. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 25) secara teknis memang ada aturan yang memungkinkan untuk melakukan koreksi laporan keuangan jika terjadi kesalahan. Sebagai perusahaan publik yang menggunakan dananya dari masyarakat, adanya kesalahan tersebut akan merugikan keputusan bahkan persepsi orang terhadap perusahaan tersebut (Murwani, 2002).

Upaya Meminimalisasi Rekayasa Akuntansi

Munculnya sejumlah rekayasa akuntansi di Amerika Serikat maupun di Indonesia seperti yang disajikan dalam kajian kasus, perlu diminimalisasikan supaya tidak merugikan *stakeholder* apabila *good corporate governance* diterapkan secara konsisten dan adanya peran akuntan secara optimal di dalam *good corporate governance* suatu perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan suatu standar *governance* yang telah diterima secara internasional akan menarik bagi para pemodal. Daniri (2002) menegaskan bahwa jika GCG diterapkan akan menjadikan pasar modal marak. Manajemen yang menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik akan melahirkan laporan keuangan yang baik pula. Hal ini disebabkan laporan keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan yang menjalankan GCG dapat diandalkan untuk mengambil keputusan.

Peranan Good Corporate Governance

Batasan *Good corporate governance* (tata kelola perusahaan) menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* adalah:

“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Cadbury (2002) dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2002) menyatakan bahwa GCG secara sempit dapat dilihat sebagai seperangkat pengaturan internal di dalam sebuah perusahaan yang mendefinisikan hubungan antara pengelola atau manajemen dengan para pemodalnya, baik itu pemodal pribadi maupun publik. Lebih lanjut Cadbury menyatakan bahwa GCG berhubungan dengan usaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.

Tujuan *corporate governance* adalah untuk mendorong penggunaan sumber daya secara efisien, sekaligus memintakan pertanggungjawaban dari proses penggunaan sumberdaya tersebut untuk dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan individu, perusahaan, dan masyarakat.

Sedangkan menurut FCGI, tujuan dari *corporate governance* adalah “ untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Prinsip GCG adalah membuat aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan direksi dan tim manajemennya (Syakhroza 2002). Namun, konsep *Good Corporate Governance* merupakan masalah etika bisnis yang tidak dapat ditegakkan hanya oleh peraturan-peraturan saja.

Ada empat unsur penting *good corporate governance* seperti yang dikemukakan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development 1998*) dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2002), yaitu:

1. *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparency* (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (akuntabilitas) adalah kapasitas untuk memanggil manajemen untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya. Prinsip akuntabilitas mempunyai dua komponen, yaitu kemampujawaban (*answerability*) dan konsekuensi (*consequence*).

4. *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Motivasi rekayasa akuntansi yang terjadi yaitu ingin menaikkan nilai perusahaan, maka muncul berbagai tindakan rekayasa untuk memenuhi harapan tersebut. Keputusan yang diambil manajemen untuk melakukan rekayasa dapat terjadi kemungkinan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Terjadinya rekayasa tersebut dapat dihindari apabila perusahaan memenuhi empat unsur *good corporate governance* tersebut.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan dewan komisaris disebabkan oleh tidak adanya ruang bagi dewan komisaris untuk mengetahui kondisi perusahaan secara sesungguhnya mengingat yang lebih tahu kondisi perusahaan secara operasional adalah manajemen, sehingga ketika harus mengambil keputusan menghasilkan keputusan yang tidak tepat. Herwidiyatmo (2002) menekankan pola hubungan antara *boards members* yang konvensional menyebabkan terputusnya mata rantai hubungan interaksi antar komisaris dan karyawan, pemegang saham, dan *stakeholders*. Akibatnya, dewan komisaris tidak mengetahui secara pasti dan obyektif kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sedang dihadapi perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Batubara (2002) juga menyatakan bahwa Dewan Komisaris, terutama komisaris independen, diberikan akses yang lebih besar ke dalam kegiatan perusahaan, supaya tidak hanya menjadi pengawas yang tugasnya mencari kelemahan direksi.

Pencegahan suatu rekayasa akuntansi dapat dilakukan dengan menciptakan *good corporate governance* karena dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Para Pemegang Saham. Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan Haka dan Chalos (1990) dalam Purwanto (2002) mengemukakan bahwa terdapat tiga mekanisme organisasi pemantauan yang penting yaitu: (1) dewan komisaris (*nonmanager board of directors*), (2) *audit eksternal* (akuntan publik), dan (3) audit internal.

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder International (2000) dalam *Forum for Corporate Governance for Indonesia* (2002), Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance*, yang ditugaskan mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi

memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Aktifnya peranan Dewan Komisaris dalam praktik tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dewan komisaris harus bersikap independen dalam hubungannya dengan pemegang saham mayoritas ataupun hubungannya dengan Dewan Komisaris ditambah memiliki integritas serta kemampuan yang dapat diandalkan. Hal tersebut menuntut pertanggungjawaban manajemen kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham.

Praptosuhardjo (2002) mengatakan untuk memberdayakan fungsi dewan komisaris perlu dibentuk komite audit yang membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan. Pembentukan perangkat struktural perusahaan seperti komite audit yang merupakan salah satu bagian dewan komisaris merupakan langkah yang tepat untuk memaksimalkan pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini ditegaskan oleh Fama dan Jensen (1993) bahwa komite audit merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris, dewan komisaris dengan dewan auditnya berfungsi sebagai arbitrase diantara para manajer tersebut.

Peran komite audit sangat besar yaitu membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite audit agar beranggotakan komisaris independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya, terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (*the institute of internal auditors, internal auditing and the audit committee: working together towards common goals*).

Pada umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu: (a) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*) Komite Audit memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut: kondisi keuangan, hasil usahanya, rencana, dan komitmen jangka panjang. (b) Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,

menjalankan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, (c) Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*), untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Untuk dapat melaksanakan *good corporate governance*, ada beberapa kendala yang dihadapi. Daniri (2002) menyimpulkan ada empat masalah yang menghambat transparansi pada perusahaan publik, yaitu:

1. Kepemilikan saham terkonsentrasi pada pendiri, sekitar 53 persen – 60 persen saham publik masih ditangani sendiri. Konsentrasi kepemilikan harus ditangani supaya bisa diterapkan dengan baik
2. Kebanyakan perusahaan bermula dari perusahaan keluarga berubah ke perusahaan terbuka sehingga proses tranformasi belum berjalan penuh
3. Komisaris dan direksi tidak independen. Akibatnya, dalam mengambil kebijakan lebih banyak berpihak pada kepentingan pemilik sendiri bukan publik
4. Kurang efektifnya dewan komisaris dalam pengawasan karena kebanyakan diwakili oleh pemilik saham pendiri.

Namun, selain kendala tersebut di atas, *good corporate governance* memberikan beberapa manfaat. Gregory (2000), seperti dikutip Prihantara (2002), menyatakan ada lima manfaat yang dapat diterima perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*, yaitu:

1. Mendorong penggunaan sumber daya secara efisien oleh perusahaan dan perekonomian nasional yang lebih besar.
2. Membantu perusahaan dan perekonomian nasional menarik investasi modal dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik dan internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, peraturan, dan ekspektasi masyarakat.
4. Mengurangi korupsi

Semakin berkembangnya konsep dan tuntutan GCG di berbagai negara, menyebabkan beberapa negara mulai dan sudah mengembangkan konsep GCG. Pemerintah Indonesia pun melalui SK Menko Ekuin Nomor Kep-10/M.EKUIIN/08/1999 tanggal 19 Agustus 1999 telah membentuk lembaga

pengatur GCG yang disebut Komisi Nasional mengenai *Corporate Governance* atau *National Committee for Corporate Governance* (NCCG) (Kurniawan 2000)

Hasil survey *Price Waterhouse Coopers* tahun 1999 terhadap investor-investor internasional di Asia menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam standar-standar akuntansi dan ketaatan pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses pengurusan perusahaan (Priantara 2002).

Peranan Akuntan Dalam Implementasi Good Corporate Governance

Untuk dapat mengembangkan dan mengimplementasikan GCG dibutuhkan peran akuntan, baik sebagai akuntan perusahaan maupun sebagai praktisi *accounting* dan *auditing* baik sebagai internal auditor maupun sebagai eksternal auditor. Untuk membuktikan bahwa suatu perusahaan sudah menjalankan GCG, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak ketiga yang independen terhadap praktik *corporate governance*. Pihak ketiga independen tersebut adalah akuntan manajemen dan akuntan publik. Akuntan manajemen antara lain membantu direksi dan dewan komisaris menyusun dan mengimplementasikan kriteria GCG di perusahaan, membantu menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercaya, *accountable*, akurat, tepat waktu, obyektif dan relevan. Selain itu, akuntan manajemen membantu direksi menyusun dan mengimplementasikan struktur pengendalian intern.

Akuntan publik sebagai pihak luar yang independen dituntut menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik. Dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia ditetapkan delapan prinsip etika yang meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional, dan standar teknis.

Akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien, apakah menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accounting accepted principle*) (Arens 1991) Laporan auditor akan digunakan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk mengambil keputusan ekonomi, untuk itu auditor dituntut bersikap independen. *Independent auditor* adalah auditor yang memiliki sikap yang tidak memihak, jujur, dan obyektif. Independen auditor dapat dibedakan 2, yaitu: (1) *independence in fact* (independensi menurut fakta jika auditor yang menurut kenyataannya dapat mempertahankan sikap yang tidak memihak, obyektif, dan jujur, (2) *independence in appearance* (independensi secara penampilan), dilihat dari penafsiran pihak lain tentang independen-

sinya, misalnya partner suatu Kantor Akuntan Publik merupakan pemegang perusahaan yang diaudit, akan dipandang tidak independen secara penampilan (Munawir 1995).

Konsep bahasan Peraturan Bapepam tentang independensi akuntan antara lain independensi akuntan dilihat dari sudut lamanya akuntan mengaudit atau memberikan jasanya pada suatu pihak. Bapepam sedang mengkaji apakah penugasan audit pada satu klien atau dibatasi tiga tahun, lima tahun, atau tujuh tahun.

Bapepam menyatakan akan mengeluarkan peraturan baru tentang independensi akuntan yang mengatur tentang pembatasan pemakaian kantor akuntan publik dan jasa akuntan publik di pasar modal. Peraturan yang akan diterbitkan itu hanya mengenai pembatasan kantor akuntan publik dan akuntan publik yang mengacu pada Keputusan Menkeu No.423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik (Bisnis Indonesia, 5 November 2002).

Hubungan yang terlalu lama antara klien dan auditor yang selama ini tidak dibatasi dinilai menyebabkan opini akuntan publik tidak lagi independen. Untuk itu, akuntan publik hanya boleh mengaudit klien yang sama maksimal tiga tahun dan untuk kantor akuntan publik paling lama lima tahun.

Kebijakan Menkeu juga mengandung celah karena tidak mengatur berapa lama klien boleh kembali ke auditor yang lama. Sesama auditor bisa saling meminjamkan kliennya satu tahun, setelah itu kembali ke bisnis normal. Bahkan, mungkin saja antar kantor akuntan bisa saling pinjam tanda tangan akuntan sementara keseluruhan pekerjaan audit tetap dilakukan auditor yang lama (Bisnis Indonesia, 28 Oktober 2002).

Simpulan

Untuk menampilkan laporan keuangan yang dapat meyakinkan para *stakeholder*, manajemen dapat melakukan berbagai praktik rekayasa, baik yang bersifat positif (tidak melanggar ketentuan) maupun yang bersifat negatif (sengaja melanggar peraturan). Berbagai praktik rekayasa yang terjadi di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat maupun di Indonesia menunjukkan seringnya dilakukan praktek rekayasa akuntansi yang bersifat negatif. Hal ini sebagai suatu pelajaran berharga bagi para investor untuk berhati-hati dalam menjalankan investasi.

Untuk meminimalisasikan praktik rekayasa akuntansi perlu diterapkan *good corporate governance* yang konsisten. *Good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan manajemen dengan pemodalnya. Peraturan tersebut memuat empat unsur penting yaitu *fairness*,

transparency, accountability, dan responsibility. Untuk melaksanakan GCG, diperlukan peran dewan komisaris, audit eksternal, dan audit internal. Sedangkan, komite audit membantu dewan komisaris menjaga fungsi-fungsi akuntansi, laporan keuangan, dan masalah-masalah finansial perusahaan.

Para akuntan perusahaan akan menangani kegiatan keuangan, *accounting*, dan *internal auditing*. Mereka berperan dalam pengembangan dan implementasi *good corporate governance*, dalam pembentukan struktur pengendalian intern yang memadai, serta penyediaan data yang akurat. Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertindak independen, dan menjunjung kode etik profesi, dengan demikian laporan yang dihasilkan akan memberi keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan akan *good corporate governance* suatu perusahaan.

Referensi

- Aquino, Gaudencio .V. 1992. *Fundamentals of research*. National Book Store, Inc.
- Arens, Lavin A., James K. Loebbecke. 1991. *Auditing: An Integrated Approach*. Fifth Edition Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Bisnis Indonesia. 2002. *Aturan Jasa Akuntan Publik Diluncurkan*, 5 November
- Bisnis Indonesia. 2002. *Bapepam Indikasikan KF Markup Untuk Divestasi*, 7 November.
- Bisnis Indonesia. 2002. *Skandal Akuntansi Ganjal Kenaikan Indeks*, 19 Juli.
- Bisnis Indonesia. 2002. *Waspada Akuntan Main Mata*, 28 Oktober.
- Bisnis Indonesia. 2002. *AS Diserang Praktik Busuk Perusahaan*, 8 September.
- Brown, Ken. 2002. Creative Methods Buff Firms. *Wall Street Journal Europe*, January 28.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia.2002 *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*.
- Gay, LR dan P.L. Diehl. 1992. *Research Methods for Business and Management*, NewYork, Macmilan Publishing Company,

- <http://www.kompas.com/bisnis/bursa/0205/13/0498.htm>: *Bapepam Kaji Aturan Independensi Akuntan*
- <http://www.kompas.com/business/bursa/0102/09/1487.htm>: *Hak Istimewa Bisa Hambat Pelaksanaan Good Corporate Governance BUMN*
- <http://www.kompas.com/business/bursa/0108/31/2776.htm>: *Komite Audit Bukan Pengontrol*
- <http://www.kompas.com/business/bursa/0109/07/2809.htm>: *GCG Bisa Hindari Penyimpangan*
- <http://www.kompas.com/business/bursa/0202/06/3707.htm>: *Menarik Pelajaran Berharga Dari Kasus Enron.*
- <http://www.kompas.com/business/bursa/0208/22/ekonomi/ditu13.htm>: *Ditunda Divestasi PT Kimia Farma*
- <http://www.ncgi-indonesia.org/nccg/Aboutgcg.htm>: *Good Corporate Governance*
- http://www.satunet.com/warta_pasar/artikel.php?article_id=82432: *Merck Berhentikan Arthur Andersen Sebagai Auditornya*
- Kontan. Bau busuk Dari Wallstreet. 2002No.40 Th VI, 8 Juli
- Laksono, Trihono Edhie. 2002. *Pelajaran Penting Skandal Worldcom*, Bisnis Indonesia, 5 Juli
- Munawir, Slamet. 1995. *Auditing Modern*. BPFE, Yogyakarta.
- Murwani, Suli H. 2002. Markup Kimia Farma, Tak Cukup Hanya Restated. *Bisnis Indonesia*, 24 September.
- Murwani, Suli H. 2002. Seribu Cara Sulap Laporan Keuangan. *Bisnis Indonesia*, 2 Agustus.
- Orey, Michael. 2002. Shreeding: It's on a Tear Again, *Wall Strret Journal Europe*, January 31.
- Purwanto, Marini.2002. Komite Audit: Tinjauan Teoritis, Kondisi Praktek di Indoensia, Temuan Empiris. *Jurnal Widaya Manajemen & Akuntansi*, Vol.1 No.3 Desember 2001: 204-211
- Priantara, Dian. 2002. Peran Akuntan Perusahaan Pada Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi/ Th.VI/01/Mei*.

Ross, S., Westerfield, R., Jaffee, J. 1996. *Corporate Finance*. Chicago: Fourth Edition, Irwin.

Safitri, Indra. 2002. Standar Akuntansi Versus Hukum. *Kompas*, 31 Juli.

Sitorus, Otto E. 2002. Skandal Enron, Tampanan Untuk Profesi Akuntan. *Kompas* 13 Maret.

Syakhroza, Akhmad. 2002. Mengkaji Tiga Pilar Good Corporate Governance. *Bisnis Indonesia*, 11 Juli.

Wall Street Journal Europe. 2002. FBI Begins Inquiry at Enron Office, January 23.

Wall Street Journal Europe. 2002. Xerox Confirm That It Overstated Income 36%. July 1.

Wall Street Journal Europe. 2002. Wall Street Tumbles 2.5% On Accounting Worries, January 30.

